

## Analisis Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia

**Siti Kharisatul Ulya<sup>1\*</sup>, Rindiani<sup>2</sup>, Gustina Masitoh<sup>3</sup>, Chika Dwi Oktaviani<sup>4</sup>, Aditya Reza Rezola<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup> Progam Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Nurul Huda, Indonesia

*Email : [kharisatululya06@gmail.com](mailto:kharisatululya06@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [gustina@unuha.ac.id](mailto:gustina@unuha.ac.id)<sup>2</sup>*

Alamat : Jl. Kota Baru, Sukaraja, Buay Madang, OKU Timur

Korespondensi penulis : [kharisatululya06@gmail.com](mailto:kharisatululya06@gmail.com)

**Abstract.** Poverty is a global social problem that hinders human progress and welfare. This issue is very complex and has been going on for a long time, especially felt by people in developing countries such as Indonesia. Therefore poverty alleviation efforts must continue to be carried out through policies and concrete steps in their implementation. Based on various theories and previous research results, there are many factors that influence the level of poverty. Such as population, per capita income, limited resources, low levels of education, and lack of employment opportunities. Research shows that population growth is significantly correlated with increasing levels of open unemployment. Meanwhile, economic growth actually shows a negative effect on the unemployment rate. The interaction between population growth and economic conditions also has an impact on the level of open unemployment. This indicates that regional and city governments need to pay more attention to handling this problem. To encourage regional economic growth and control the rate of population growth, financial investment must be accompanied by the creation of new jobs. Thus, the community will have more job opportunities, so that unemployment and poverty can be suppressed.

**Keywords:** Unemployment Rate, Poverty, Economic Growth

**Abstrak.** Kemiskinan merupakan permasalahan sosial berskala global yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan manusia. Isu ini sangat kompleks dan telah berlangsung lama. Terutama dirasakan oleh masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan melalui kebijakan dan langkah konkret dalam pelaksanaannya. Berdasarkan berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya, terdapat banyak faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti jumlah penduduk, pendapatan per kapita, keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya lapangan pekerjaan. Penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berkorelasi signifikan dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap angka pengangguran tersebut. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah dan kota perlu menaruh perhatian lebih dalam menangani persoalan ini. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, investasi finansial harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki lebih banyak peluang kerja, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan.

**Kata Kunci:** Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi

### 1. LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan telah menjadi salah satu isu penting mendasar yang terus membayangi proses pembangunan di Indonesia. Sejak negara ini merdeka, tantangan kemiskinan selalu menjadi sorotan utama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek sosial, politik, budaya, hingga tata kelola kelembagaan. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, sekaligus menunjukkan ketimpangan dalam hal distribusi

sumber daya, akses terhadap layanan esensial, dan kesempatan ekonomi yang belum merata. Dalam rangka pembangunan nasional, penanggulangan kemiskinan selalu ditempatkan sebagai prioritas utama, ini terlihat dari berbagai rencana dan kebijakan strategis pemerintah, termasuk dalam dokumen seperti RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional). Yang menekankan pentingnya pengurangan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai bentuk bantuan sosial, seperti Program Keluarga Berencana (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi pangan, serta program kartu Indonesia pintar. Namun demikian, kompleksitas persoalan kemiskinan menurut pendekatan yang holistik dan berkesinambungan agar solusi yang diterapkan benar-benar afektif.

Salah satu faktor yang memiliki keterlibatan erat dengan kemiskinan adalah pengangguran. Jumlah pengangguran yang tinggi menjadi indikator ketidakmampuan sistem ekonomi menyerap tenaga kerja secara optimal. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka otomatis ia kehilangan penghasilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pengangguran juga menciptakan beban tambahan dalam keluarga, membatasi peluang peningkatan taraf hidup, dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, tingginya tingkat pengangguran tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga tantangan kolektif bagi pembangunan bangsa. Secara umum, pengangguran di Indonesia lebih banyak bersifat struktural, dengan dominan pada sektor informal. Banyak lulusan pendidikan formal tidak dapat langsung terserap ke dalam dunia kerja karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan mereka dan kebutuhan pasar kerja. Disamping itu, kurangnya fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja serta belum meratanya investasi diberbagai daerah menyebabkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Oleh karena itu, persoalan pengangguran di Indonesia bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga mencakup dimensi kualitas dan ketidaksesuaian keahlian. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan yang positif seharusnya menciptakan peningkatan output nasional, memperluas lapangan kerja, dan menaikkan pendapatan masyarakat. Idealnya, hal ini akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akan tetapi, dalam kenyataan, manfaat pertumbuhan ekonomi sering kali tidak dirasakan secara merata. Pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu dan terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menciptakan yang lebih tajam.

Fenomena ini dikenal sebagai pertumbuhan yang tidak inklusif dimana kelompok masyarakat miskin tidak memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi. Akibatnya,

kesenjangan sosial dan ekonomi makin melebar. Di indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan masih bertahan terutama diwilayah-wilayah terpencil dan pendesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pemerataan manfaat dan pembangunan infrasstruktur yang mendukung keadilan sosial. Hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan saling memengaruhi. Dalam beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pengangguran jika proses pertumbuhan lebih mengandalkan teknologi dan modal daripada tenaga kerja. Sebaliknya, penganggurana yang tinggi dapat menurunkan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Situasi ini berpotensi memperparah yang kprehensif terhadap ketiga varibel ini dalam merancang strategi pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan dengan tingkat beraneka ragam wilayah yang tinggi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pemerataan pembangunan. Ketimpangan dalam hal infrastruktur, layanan publik, dan akses terhadap pekerjaan layak menjadi kendala utama dalam mengatasi kemiskinan, khususnya di wilayah timur indonesia dan daerah-daerah terpencil. Masalah kemiskinan di Indonesia sangat berkaitan dengan struktur ekonomi dan tata kelola pembangunan yang belum sepenuhnya adil dan inklusif.

Oleh sebab itu, memahami keterkaitan antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah perlu memperkuat upaya penciptaan lapangan tenaga kerja produktif, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan profesional, mendukung sektor UMKM, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus diarahkan untuk dinikmati oleh semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang rentan dan semalma ini terpinggirkan dari proses pembangunan. Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penurunan angka pengangguran serta distribusi hasil pembangunan yang lebih adil. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan menyeluruh dan berkeadilan sosial menjadi kunci dalam menciptakan indonesia yang lebih sejahtera dan merata di masa depan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Negara-negara yang berada dalam kategori berkembang masih terus menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kemiskinan yang menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami hal serupa, di mana berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemiskinan sendiri tidak muncul tanpa sebab; banyak faktor yang saling berkaitan menjadi pemicu, khususnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan sering kali berpengaruh terhadap produktivitas dan kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam konteks pembangunan, keberhasilan suatu metode atau kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan angka pengangguran, serta kurangnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (Masruron, 2020).

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran (Maskur, 2023). Sampai saat ini, upaya untuk mengentaskan kemiskinan belum sepenuhnya berhasil karena kompleksitas permasalahan yang menyertainya. Hal ini disebabkan oleh dampak kemiskinan yang luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan individu, baik dari segi sosial, ekonomi, hingga kesejahteraan secara umum. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal yang layak, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta pendidikan yang berkualitas. Lebih jauh lagi, kemiskinan juga berdampak pada partisipasi individu dalam pembangunan, di mana orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk turut serta dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat sementara atau reaktif, tetapi juga menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Pendekatan yang terintegrasi dan serius menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan (Oktaviani, Rengganis, & Desmawan, 2022).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan struktural yang masih menjadi perhatian global hingga saat ini. Hampir seluruh negara di dunia, baik yang tergolong sebagai negara berkembang maupun negara maju, menghadapi tantangan dalam mengurangi atau menghapus

kemiskinan secara menyeluruh. Meskipun negara maju memiliki sistem ekonomi dan infrastruktur yang lebih kuat, nyatanya mereka tetap mengalami kesulitan dalam menangani lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi semata, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, politik, bahkan psikologis. Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa bersifat parsial atau sektoral, melainkan harus dirancang secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor, serta dilakukan secara berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu indikator paling penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pemerintah dituntut tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi kemiskinan atau mempersempit kesenjangan sosial tidak dapat dikatakan berhasil secara menyeluruh.

Secara konseptual, kemiskinan sering diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti kebutuhan akan makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya produktif. Dalam pendekatan ekonomi, kemiskinan diukur melalui tingkat pendapatan atau pengeluaran yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, definisi semacam ini dianggap terlalu sempit karena hanya menyoroti satu aspek dari banyak dimensi yang memengaruhi kualitas hidup manusia. Amartya Sen, seorang ekonom ternama peraih Penghargaan Nobel, memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang kemiskinan. Ia menolak definisi sempit yang hanya mengaitkan kemiskinan dengan rendahnya pendapatan. Menurut Sen, kemiskinan adalah kondisi yang ditandai oleh terbatasnya kemampuan atau kapabilitas seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai bermakna. Dalam pandangannya, kemiskinan bukan hanya tentang tidak memiliki uang, tetapi juga tentang tidak memiliki pilihan dan kesempatan untuk hidup secara layak dan bermartabat. Misalnya, seseorang mungkin memiliki pendapatan, tetapi jika ia tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, maka ia tetap berada dalam kondisi yang disebut sebagai kemiskinan. Pendekatan ini dikenal sebagai kemiskinan multidimensi, karena menilai kesejahteraan individu dari banyak aspek kehidupan, bukan hanya finansial. Lebih lanjut, pendekatan eksklusi sosial juga memberikan perspektif yang penting dalam memahami kemiskinan. Dalam pendekatan ini, seseorang dianggap miskin apabila ia terpinggirkan dari kehidupan sosial, tidak memiliki akses yang setara terhadap

sumber daya, layanan publik, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Eksklusi ini bisa disebabkan oleh diskriminasi, kurangnya pendidikan, pengangguran, lokasi geografis, atau bahkan faktor budaya. Dengan kata lain, kemiskinan dalam pendekatan ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan struktural, karena menghambat seseorang untuk menjadi bagian dari masyarakat secara utuh (Cembawan Wijaksana, 2022).

Pembangunan dalam konteks suatu negara atau wilayah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kualitas hidup ini mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan distribusi yang adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Artinya, hasil dari pertumbuhan tersebut harus dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa terkecuali, baik masyarakat di daerah maju maupun tertinggal, agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin melebar. Dalam jangka panjang, pemerataan hasil pembangunan ekonomi akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, dan yang lebih penting lagi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan (Rahmadi, 2019).

Selain itu, salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sayangnya, salah satu penyebab utama rendahnya nilai IPM di berbagai wilayah adalah tingginya tingkat pengangguran. Pengangguran yang tinggi bukan hanya menunjukkan ketidakefisienan pasar tenaga kerja, tetapi juga menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pengukuran IPM, tingkat pengangguran memengaruhi dimensi daya beli dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Hal ini karena pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia dan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap mereka. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia secara proporsional. Jika tidak ada upaya serius untuk mengurangi pengangguran, maka hal ini akan terus menjadi faktor penghambat dalam mendorong pembangunan manusia dan mempercepat kesejahteraan sosial (Astriani, Muchtolifah, & Sishadiyati, 2021).

Pengangguran merupakan isu penting yang kerap terabaikan dalam berbagai diskusi. Istilah ini merujuk pada individu yang tidak sedang bekerja atau tengah berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya terjadi pada kelompok usia tertentu dan dipengaruhi oleh

terbatasnya lapangan kerja. Meskipun para pencari kerja berharap memperoleh penghasilan dan tunjangan yang layak. Secara umum, pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah pekerjaan yang tersedia (Sukirno, 2004:327). Masalah pengangguran menjadi tantangan sosial utama di negara-negara berkembang. Dalam hal ini, penciptaan lapangan kerja menjadi elemen penting dalam mendukung pembangunan masyarakat. Menurut Smodingnirat, tenaga kerja berperan sebagai pelaku dalam proses produksi. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Permasalahan pengangguran di Indonesia, masih menjadi perhatian utama mengingat tingginya angka pengangguran. Pengangguran berkontribusi besar terhadap kemiskinan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Penyebaran informasi tentang lowongan kerja menjadi saran penting bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Data terbaru menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kelompok masyarakat kurang mampu sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses peluang kerja, memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha, mengalami ketimpangan upah, dan berkurangnya perlindungan terhadap aset usaha maupun pekerjaan mereka.

Minimnya kesempatan kerja mendorong banyak orang untuk bekerja dalam kondisi yang tidak menentu, dengan bayaran rendah dan tingkat risiko tinggi. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, terutama selama masa krisis, memperoleh kondisi ini. Terlihat banyaknya pengangguran dari kalangan usia produktif yang baru saja lulus dari pendidikan dan sedang berusaha memasuki dunia kerja. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rendah terhadap kemiskinan karena tiga alasan;;

1. Rumah tangga berpendapatan rendah memiliki banyak tanggungan, terutama di daerah pedesaan
2. Kemiskinan cenderung diwariskan secara turun-temurun, dimana banyak anak muda lahir dari keluarga kurang mampu dan harus bekerja sejak dini dengan bayaran rendah
3. Mereka sedang berada dalam masa peralihan menuju kemandirian, dan latar belakang pendidikan yang terbatas menyulitkan mereka memperoleh pekerjaan yang layak

Upaya untuk memperluas lapangan kerja menghadapi dilema antara mendorong investasi di sektor padat karya dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk jaminan kerja dan upah yang layak. Meski begitu, pengangguran tetap menjadi isu penting dalam

perdebatan global karena dampaknya yang besar terhadap meningkatnya angka kemiskinan suatu negara.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi pustaka atau tinjauan literatur sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman teori, konsep, serta temuan-temuan dari berbagai sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara, kuesioner, atau observasi, melainkan menggali informasi yang telah dipublikasikan atau didokumentasikan oleh peneliti atau institusi lain. Sumber-sumber data yang digunakan dalam studi pustaka ini sangat beragam, mencakup buku-buku ilmiah, artikel akademik, jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, tesis dan skripsi yang relevan, serta sumber digital seperti website resmi pemerintah, lembaga riset, media online terpercaya, dan blog ilmiah yang memiliki kredibilitas tinggi. Semua sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan keterkaitannya dengan topik yang dibahas, keaktualan informasi, dan keabsahan data.

Tahapan pertama dalam proses ini adalah peneliti melakukan identifikasi terhadap isu atau permasalahan yang akan diteliti. Setelah topik ditentukan, peneliti mulai mencari dan mengumpulkan bahan pustaka dari berbagai sumber tersebut. Informasi yang didapatkan kemudian diseleksi untuk memastikan bahwa hanya data yang benar-benar relevan dan valid yang digunakan dalam analisis. Peneliti membaca secara mendalam setiap materi, kemudian mencatat poin-poin penting, gagasan utama, hasil temuan, serta pendapat para ahli yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan pendapat dari berbagai sumber, menghubungkan teori-teori yang ada, serta mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antar referensi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan pola, memahami hubungan antar konsep, serta membangun kerangka berpikir yang kuat sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan. Pendekatan studi pustaka dinilai sangat bermanfaat karena memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai informasi dalam waktu yang lebih singkat dan efisien. Metode ini juga mempermudah peneliti dalam mengkaji penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat memperkaya isi kajian dan memperkuat argumen dalam penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga bermanfaat dalam membangun dasar teoritis yang kokoh sebagai landasan berpikir dalam membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat

menyajikan hasil kajian yang mendalam, logis, dan berbasis pada referensi yang terpercaya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas dari penelitian yang dilakukan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan fundamental yang senantiasa menjadi fokus utama perhatian pemerintah di berbagai belahan dunia. Isu ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemajuan sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu negara. Orang-orang yang termasuk dalam kategori miskin umumnya hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, di mana mereka tidak memiliki akses terhadap berbagai peluang dan alternatif untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk makanan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, layanan kesehatan, serta akses terhadap pekerjaan yang memadai. Situasi ini menggambarkan kegagalan dalam sistem sosial dan ekonomi yang seharusnya menjamin kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Masalah kemiskinan ini paling banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kompleksitas kemiskinan mencerminkan kenyataan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan atau kekayaan, melainkan juga melibatkan berbagai aspek struktural dan sistemik. Terdapat sejumlah faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan, antara lain minimnya kepemilikan aset atau sumber daya, struktur sosial dan politik yang tidak mendukung inklusivitas, serta keterbatasan dalam hal kemampuan personal seperti keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan. Di samping itu, aspek-aspek sekunder seperti lemahnya jaringan sosial, keterbatasan akses terhadap informasi, dan kurangnya dukungan keuangan juga memperburuk kondisi kemiskinan yang ada. Fenomena ini sering kali diilustrasikan dengan konsep “Gunung Es,” di mana apa yang tampak di permukaan hanyalah gejala dari masalah yang lebih dalam dan kompleks. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara menyeluruh, perhatian utama harus diarahkan pada akar penyebabnya, bukan hanya pada tanda-tanda lahiriah yang tampak.

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori minimum harian, yaitu sebesar 2.100 kilokalori. Ini merupakan indikator garis kemiskinan yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Sementara itu, menurut standar internasional dari Bank Dunia, kemiskinan ekstrem diartikan sebagai kondisi di mana individu hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar Amerika per hari. Angka ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai

kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan proses peningkatan kapasitas produksi dan konsumsi dalam masyarakat, serta menunjukkan adanya perubahan positif dalam kondisi ekonomi secara umum. Pertumbuhan ini biasanya terjadi dalam periode waktu tertentu dan dapat diukur melalui berbagai indikator makroekonomi, seperti peningkatan pendapatan nasional, lapangan kerja, dan konsumsi masyarakat.

Salah satu faktor dominan yang memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memainkan peran penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan karena mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Menurut definisi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merupakan jumlah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, semakin besar nilai PDRB yang dicapai oleh suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah salah satunya dapat dilihat melalui indikator PDRB per kapita, yaitu rasio antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk. Nilai ini menggambarkan rata-rata pendapatan yang secara teoritis dapat diterima oleh setiap individu dalam populasi tersebut. Pendapatan yang cukup akan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2006) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai taraf hidup masyarakat. Sukirno (2019) menjelaskan bahwa pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi total pendapatan suatu wilayah dengan jumlah penduduk selama periode waktu tertentu. Ketika pendapatan per kapita mengalami penurunan, maka daya beli masyarakat pun ikut menurun, yang berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Wahyu Azizah dan rekan-rekannya (2018) yang mengaitkan turunnya pendapatan dengan meningkatnya potensi seseorang untuk jatuh ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di samping itu, salah satu penyebab utama peningkatan jumlah penduduk miskin adalah tingginya angka pengangguran di suatu wilayah. Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Setiap tahun, angkatan kerja baru terus bertambah,

namun jika pertumbuhan kesempatan kerja tidak sejalan, maka angka pengangguran akan meningkat. Sukirno (2017) menyatakan bahwa kondisi ini diperburuk oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, yang menyebabkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja semakin tinggi. Selain itu, faktor lain seperti tutupnya perusahaan atau bangkrutnya sektor industri juga berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kenaikan angka pengangguran sangat berkorelasi dengan naiknya angka kemiskinan. Semakin banyak individu yang tidak memiliki pekerjaan, semakin besar kemungkinan mereka tidak memiliki pendapatan tetap untuk mencukupi kebutuhan dasar. Dalam hal ini, pengangguran didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang tidak terserap oleh aktivitas ekonomi produktif. Berdasarkan pendekatan demografis, angkatan kerja mencakup penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian, individu yang tergolong dalam kelompok usia ini namun belum mendapatkan pekerjaan, termasuk dalam kategori pengangguran (Pengangguran et al., 2023). Rahardja dan Manurung (2008) menambahkan bahwa keberadaan pengangguran mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, yang pada akhirnya turut menyumbang pada peningkatan tingkat kemiskinan di masyarakat.

Salah satu penyebab utama pengangguran dapat berasal dari faktor pribadi, seperti sikap apatis, kondisi disabilitas atau usia lanjut, serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah (Kristin et al., 2018b). Di Indonesia sendiri, meningkatnya jumlah pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah:

1. ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan,
2. kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat luas,
3. pembangunan ekonomi yang kurang terarah atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,
4. serta meningkatnya jumlah perempuan yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja.

Pengangguran merupakan permasalahan struktural yang tidak mudah diatasi karena melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang erat antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. Menurut Khodijah (2019), terdapat beberapa faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam memahami penyebab utama pengangguran.

1. Adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan banyak orang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya.
2. Rendahnya penguasaan keterampilan dan keahlian teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja membuat banyak calon tenaga kerja kurang kompetitif.
3. Terbatasnya informasi mengenai lowongan pekerjaan dan perusahaan yang membuka rekrutmen juga menjadi hambatan bagi pencari kerja untuk mengakses peluang kerja yang relevan.
4. Distribusi pekerjaan yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan wilayah-wilayah tertentu mengalami kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduknya.
5. Minimnya pelatihan kerja serta pengembangan soft skill turut memperburuk situasi, karena pencari kerja tidak memiliki bekal yang cukup untuk bersaing dalam dunia kerja. Selain itu, faktor budaya seperti rendahnya etos kerja dan kurangnya motivasi pribadi juga menjadi penghalang yang signifikan dalam proses pencarian pekerjaan.

Menurut Sukirno, seperti yang dikutip oleh Imma Latifa dan Farid Pribadi (2021), pengangguran dapat dikategorikan berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu berdasarkan penyebab terjadinya dan karakteristik yang melekat pada kondisi tersebut.

#### 1. Klasifikasi Berdasarkan Penyebab Terjadinya Pengangguran:

##### a) Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment):

Jenis pengangguran ini timbul sebagai akibat dari adanya peralihan pekerjaan secara sukarela oleh individu yang sedang mencari peluang kerja yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena individu memilih untuk berhenti dari pekerjaan mereka guna mendapatkan pekerjaan baru yang dianggap lebih sesuai atau memuaskan. Selama masa transisi tersebut, individu tidak bekerja untuk sementara waktu. Meskipun bersifat sementara, pengangguran jenis ini tetap masuk dalam kategori pengangguran karena terdapat jeda waktu antara pekerjaan lama dengan pekerjaan baru.

##### b) Pengangguran Siklis (Cyclical Unemployment):

Tingkat pengangguran ini berkaitan erat dengan siklus ekonomi suatu negara. Saat perekonomian sedang mengalami perlambatan atau resesi, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga banyak perusahaan mengurangi produksi dan memangkas jumlah tenaga kerja. Penurunan aktivitas ekonomi ini menyebabkan meningkatnya angka

pengangguran. Namun, ketika kondisi ekonomi membaik, permintaan akan meningkat kembali, produksi akan berkembang, dan tenaga kerja akan kembali diserap, yang menyebabkan penurunan angka pengangguran.

c) Pengangguran Struktural (Structural Unemployment):

Pengangguran ini muncul akibat perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara. Perubahan ini bisa disebabkan oleh kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, atau perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Misalnya, ketika mesin-mesin modern mengantikan pekerjaan manual, atau ketika tren pasar berubah drastis, maka jenis-jenis pekerjaan tertentu menjadi tidak relevan lagi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan meskipun lowongan tersedia di bidang lain.

d) Pengangguran Teknologis:

Jenis pengangguran ini secara khusus diakibatkan oleh kemajuan teknologi di dunia industri. Tenaga manusia yang dulunya dibutuhkan dalam proses produksi secara bertahap digantikan oleh mesin-mesin otomatis yang lebih efisien dan cepat. Akibatnya, tenaga kerja manual menjadi tidak lagi diperlukan dalam jumlah besar, sehingga terjadi pengurangan jumlah pekerja secara signifikan.

2. Klasifikasi Berdasarkan Karakteristik Pengangguran:

a) Pengangguran Terbuka:

Jenis pengangguran ini ditandai oleh situasi di mana jumlah pencari kerja atau angkatan kerja jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan akan tenaga kerja menyebabkan banyak individu tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang di mana pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang memadai. Akibatnya, sebagian besar masyarakat produktif tidak terserap ke dalam pasar kerja.

3. Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment):

Jenis pengangguran ini menggambarkan kondisi di mana meskipun banyak orang terlibat dalam suatu kegiatan atau sektor kerja, kontribusi mereka terhadap hasil atau produktivitas sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak signifikan. Hal ini sering terjadi di

sektor informal atau di bidang pertanian tradisional, di mana jumlah tenaga kerja yang digunakan sebenarnya melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu. Dengan kata lain, keberadaan mereka tidak memberikan dampak berarti terhadap peningkatan efisiensi atau hasil produksi.

#### 4. Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment):

Pengangguran jenis ini muncul sebagai akibat dari fluktuasi kebutuhan tenaga kerja yang mengikuti pola musim atau waktu tertentu dalam setahun. Misalnya, dalam sektor pertanian, permintaan tenaga kerja meningkat saat masa tanam atau panen, namun berkurang drastis di luar musim tersebut. Hal serupa juga terjadi di sektor perikanan, pariwisata, atau konstruksi musiman, di mana pekerjaan tidak tersedia sepanjang tahun, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu.

#### 5. Pengangguran Setengah (Underemployment):

Underemployment mengacu pada kondisi ketika seseorang bekerja namun dengan jam kerja yang kurang dari standar normal—misalnya di bawah 35 jam per minggu. Underemployment ini dibagi ke dalam dua bentuk utama:

##### a. Underemployment Involunter (Setengah Menganggur Secara Paksa):

Individu yang termasuk dalam kategori ini hanya bekerja sebagian waktu dan memiliki keinginan kuat untuk menambah jam kerja atau mencari pekerjaan tambahan karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan saat ini belum mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka aktif mencari peluang kerja tambahan guna meningkatkan taraf hidupnya.

##### b. Underemployment Volunter (Setengah Menganggur Secara Sukarela):

Dalam kelompok ini, individu memilih untuk bekerja di bawah jam kerja normal, namun tidak berminat untuk mencari tambahan pekerjaan. Mereka lebih memilih waktu kerja yang fleksibel dan pendek, biasanya karena alasan pribadi seperti merawat keluarga, melanjutkan pendidikan, atau alasan kesehatan.

##### c. Faktor-Faktor Tambahan Penyebab Pengangguran:

Pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga oleh tingkat upah, kebijakan pemerintah, dan struktur kelembagaan yang mengatur pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran bukanlah masalah eksklusif negara berkembang saja, tetapi juga dihadapi oleh negara-negara maju. Seperti yang dijelaskan oleh Linbeck dalam buku Guntur (2023), salah satu penyebab utama pengangguran adalah adanya kelemahan dalam sistem

kelembagaan yang mengelola regulasi ketenagakerjaan, termasuk fleksibilitas kontrak kerja, perlindungan tenaga kerja, dan sistem rekrutmen. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah tantangan karena penciptaan lapangan kerja tidak selalu sebanding dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak—pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan—untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan zaman, guna mengurangi tingkat pengangguran secara berkelanjutan. Mengatasi pengangguran memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, tidak hanya dari sisi kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia pendidikan, sektor industri, lembaga pelatihan kerja, serta partisipasi aktif masyarakat. Diperlukan sinergi antar lembaga dalam merancang kebijakan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, memperluas kesempatan kerja melalui investasi di sektor produktif, serta menciptakan sistem informasi ketenagakerjaan yang transparan, mudah diakses, dan menyeluruh.

Dalam dinamika ketenagakerjaan, fenomena pengangguran terus menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pengangguran yang sering dijumpai adalah pengangguran terbuka, yakni kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja aktif tidak memiliki pekerjaan sama sekali, walaupun mereka secara fisik mampu dan secara aktif mencari pekerjaan. Kelompok ini tidak berkontribusi secara langsung dalam kegiatan ekonomi karena tidak memiliki pekerjaan tetap maupun pendapatan yang dapat digunakan untuk menunjang konsumsi harian. Selain pengangguran terbuka, terdapat juga bentuk pengangguran lain yang disebut sebagai pengangguran terselubung (disguised unemployment). Jenis ini merujuk pada situasi di mana seseorang sebenarnya bekerja, namun hanya terlibat secara minimal dalam aktivitas ekonomi atau bekerja dalam jam kerja yang jauh di bawah standar. Mereka mungkin juga bekerja dalam sektor informal atau pekerjaan musiman yang tidak memberikan kestabilan pendapatan. Kondisi ini umum terjadi di kawasan perkotaan yang sedang tumbuh pesat, di mana lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk usia kerja. Sering kali, pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, keterampilan, atau ekspektasi para pencari kerja.

Kedua jenis pengangguran tersebut—terbuka dan terselubung—memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap daya beli masyarakat. Individu yang tidak memiliki pendapatan yang memadai cenderung mengurangi konsumsi terhadap barang dan jasa, terutama pada kebutuhan sekunder dan tersier. Penurunan konsumsi ini secara agregat

menurunkan permintaan di pasar, yang pada gilirannya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penurunan konsumsi berarti menurunnya kontribusi sektor rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak lanjutan dari melemahnya konsumsi akibat tingginya pengangguran adalah penurunan penerimaan pajak negara, khususnya dari pajak penghasilan. Ketika masyarakat tidak memperoleh pendapatan tetap, mereka tidak dapat menjadi kontributor dalam sistem perpajakan. Akibatnya, kemampuan pemerintah daerah maupun pusat dalam menghimpun pendapatan untuk membiayai berbagai program pembangunan menjadi terbatas. Ini mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan intervensi sosial lainnya. Dalam jangka panjang, kurangnya pendanaan untuk pembangunan dapat menyebabkan stagnasi atau bahkan penurunan kualitas layanan publik dan fasilitas umum. Lebih jauh lagi, apabila pengangguran terus meningkat tanpa adanya intervensi kebijakan yang memadai, maka daerah tersebut dapat menghadapi krisis ekonomi atau resesi. Resesi ditandai dengan penurunan aktivitas ekonomi secara terus-menerus dalam periode tertentu, yang diperburuk oleh rendahnya investasi, konsumsi, dan penerimaan pemerintah. Situasi ini juga bisa memicu masalah sosial lainnya, seperti meningkatnya angka kriminalitas, penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta bertambahnya ketimpangan ekonomi antarwilayah.

PDRB mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ekspansi ekonomi berperan sebagai tolok ukur makro dalam mengevaluasi performa ekonomi secara nyata. Namun demikian, aspek demografi juga memainkan peranan penting dalam memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti pertumbuhan jumlah penduduk dan kepadatan populasi dapat memberikan dampak yang beragam. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas dan profesionalisme di berbagai sektor ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan populasi yang tidak seimbang dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya yang tersedia, terutama jika distribusinya tidak merata dan konsentrasi penduduk terlalu tinggi di wilayah tertentu. Meskipun peningkatan kualitas sumber daya manusia—melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi—dapat memperkuat daya saing tenaga kerja dan mendorong kemajuan ekonomi, masalah kepadatan penduduk tetap menjadi

tantangan besar. Ketimpangan distribusi populasi menyebabkan sebagian wilayah menjadi sangat padat, sedangkan wilayah lain justru kekurangan sumber daya manusia produktif. Tingginya kepadatan penduduk sering kali menyebabkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti menurunnya kualitas hidup, meningkatnya pengangguran, kemacetan, serta kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan yang layak. Bahkan, dalam jangka panjang, kepadatan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Lingkungan memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan manusia, karena menyediakan berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, udara segar, dan tempat tinggal. Ketika permintaan terhadap sumber daya alam melebihi kapasitas regeneratif lingkungan, maka terjadi degradasi yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat.

Kemiskinan adalah sebuah persoalan sosial yang juga menjadi tantangan besar yang dihadapi masyarakat di berbagai belahan dunia. Istilah ini merujuk pada situasi di mana individu tidak mampu atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk hidup sesuai dengan standar yang berlaku dalam komunitasnya. Dalam pandangan tertentu, kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok, khususnya pangan, di mana ukurannya tidak semata-mata dilihat dari besarnya pengeluaran. Orang yang tergolong miskin umumnya adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran bulanan yang berada di atas garis kemiskinan. Walaupun kerap dipandang sebagai isu ekonomi, kemiskinan juga mencakup aspek ketidaktersediaan dokumen atau legalitas tempat tinggal yang penting bagi kelangsungan hidup. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga mencerminkan keterbatasan dalam mencapai kehidupan yang layak. Lebih dari itu, kemiskinan juga berhubungan erat dengan kemampuan individu dan keluarga untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki taraf hidupnya. Giovanni, Beik, dan Arsyanti (2016) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat ditinjau dari tiga dimensi utama, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural.

#### a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan bentuk kemiskinan yang diukur berdasarkan jumlah individu dalam suatu populasi yang hidup dalam kondisi sangat terbatas, di mana penghasilan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka ia termasuk dalam kategori kemiskinan absolut. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk menentukan batas minimum pendapatan yang dianggap cukup untuk mencukupi kebutuhan

pokok agar seseorang dapat bertahan hidup. Namun, tantangan dalam pendekatan ini terletak pada sulitnya menentukan apa saja yang termasuk dalam kebutuhan dasar dan seberapa besar nilainya. Hal ini karena standar kebutuhan dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, iklim, tingkat pembangunan nasional, dan kondisi ekonomi secara umum. Agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang layak, mereka membutuhkan barang dan jasa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosialnya (Azizah & Asiyah, 2022).

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif terjadi ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun taraf hidupnya tetap jauh di bawah rata-rata masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, meskipun secara absolut seseorang tidak dianggap miskin, secara sosial ia tetap berada dalam posisi yang tertinggal karena adanya ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan.

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok masyarakat memiliki pola pikir atau sikap yang pasrah dan tidak berupaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam kondisi ini, kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan juga oleh sikap internal yang enggan berubah atau berkembang. Meskipun pihak luar telah memberikan bantuan atau dukungan, jika sikap dari individu itu sendiri tidak berubah, maka mereka tetap terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Tingkat kemiskinan digunakan untuk menentukan batas atau ambang minimum yang disebut sebagai garis kemiskinan. Batas ini tidak hanya ditentukan dalam bentuk angka nominal (misalnya dalam rupiah), tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dasar seperti konsumsi makanan minimum. Menurut data dari Pahit Manis (2023), pemahaman terhadap tingkat konsumsi masyarakat sangat penting dalam menentukan siapa yang dikategorikan sebagai miskin dari sudut pandang ekonomi dan sosial.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, salah satunya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini dapat tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan secara luas sebagai indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. IPM menjadi alat analisis penting dalam memahami seberapa besar kapasitas manusia dalam berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Indeks Pembangunan Manusia sendiri merupakan pengukuran

komposit yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat, yang direpresentasikan oleh harapan hidup saat lahir; (2) pengetahuan, yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; serta (3) standar hidup layak, yang diukur dari pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Melalui pendekatan ini, IPM tidak hanya menekankan aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan dan kesehatan yang menjadi fondasi penting dalam membentuk kualitas individu.

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi setiap individu, yang mencakup akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang optimal, serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memadai (Sisnita, 2017). Dengan kata lain, pembangunan manusia bertujuan untuk memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang produktif, kreatif, dan bermartabat sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Ketika suatu wilayah memiliki nilai IPM yang rendah, hal ini menandakan bahwa penduduknya secara umum mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Keterbatasan ini menyebabkan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut cenderung rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pendidikan yang tidak memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Akibatnya, individu dalam kelompok ini sulit untuk bersaing di pasar kerja yang semakin menuntut kualifikasi tinggi. Produktivitas yang rendah berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Ketika seseorang tidak mampu bekerja secara optimal atau tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pun menurun. Pendapatan yang terbatas menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pada akhirnya, pendapatan rendah ini menjadi pemicu utama tingginya angka kemiskinan di suatu daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhanisa dan Triwahyuningyas (2022). Lebih lanjut, rendahnya pendapatan masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Daya beli yang menurun akan menghambat pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, karena konsumsi masyarakat merupakan salah satu pendorong utama dalam aktivitas ekonomi. Dampak ini bisa meluas hingga menurunkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan terpadu. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan dan program yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Upaya ini harus disertai dengan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis. Hanya dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, masalah kemiskinan dapat diatasi dari akarnya dan tidak lagi menjadi warisan antar generasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, para peneliti meyimpulkan bahwa terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa terdapat hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan: ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami peningkatan, maka secara umum tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi salah satu komponen fundamental yang perlu dijadikan prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari peningkatan angka statistik makroekonomi seperti PDB (Produk Domestik Bruto) semata. Pertumbuhan tersebut harus bersifat menyeluruh, merata, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan sosial dan wilayah geografis. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhatikan aspek kualitas pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang luas, berkualitas, dan inklusif, serta memberikan akses yang adil bagi semua kelompok masyarakat, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah direkomendasikan agar meningkatkan investasi pada sektor-sektor strategis yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti sektor industri manufaktur, pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia—termasuk daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan—juga menjadi kunci penting dalam menciptakan

konektivitas ekonomi dan membuka akses masyarakat terhadap berbagai peluang kerja dan usaha. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor krusial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Tidak hanya pendidikan formal, pelatihan keterampilan teknis dan profesional juga sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Dalam hal ini, pendirian dan pengembangan pusat pelatihan kejuruan atau vocational training centers sangat diperlukan untuk memberikan pelatihan kerja berbasis keterampilan praktis dan aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lebih lanjut, keberadaan lembaga pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja lokal, tetapi juga akan memperkuat kemampuan mereka untuk bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja yang semakin terbuka. Dengan meningkatnya daya saing tenaga kerja Indonesia, maka peluang kerja akan semakin terbuka, pengangguran akan menurun, dan pada akhirnya, tingkat kemiskinan pun dapat ditekan secara signifikan.

Selain upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, pemerintah juga perlu melakukan reformasi kelembagaan, khususnya terhadap Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait lainnya. Penguatan kapasitas institusi-institusi ini sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif, mulai dari perumusan kebijakan ketenagakerjaan, pelaksanaan program pelatihan, hingga pengawasan terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan di lapangan. Salah satu aspek penting yang perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah adalah penerapan kebijakan upah minimum di seluruh wilayah Indonesia. Penerapan upah minimum harus dilakukan secara adil dan konsisten agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah, yang dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini, serta memastikan bahwa semua pekerja menerima hak-haknya sesuai dengan standar upah minimum yang telah ditetapkan. Distribusi yang merata dan pelaksanaan yang adil dari kebijakan upah minimum ini akan sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Lebih dari itu, penting juga bagi pemerintah untuk membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional dalam merancang dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi yang sinergis antar

pemangku kepentingan akan memperkuat efektivitas intervensi pemerintah dan menciptakan solusi yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah nyata dan terukur dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dengan mengintegrasikan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kapasitas tenaga kerja, penguatan institusi ketenagakerjaan, pengawasan terhadap kebijakan upah minimum, serta pembangunan kemitraan lintas sektor, maka Indonesia akan semakin mendekati cita-citanya sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat, di mana seluruh rakyatnya dapat hidup sejahtera dan terbebas dari kemiskinan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Antaranews. (2023). BPS sebut tingkat kemiskinan Sumut menurun pada Maret 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3639618/bpssebut-tingkat-kemiskinan-sumut-menurun-pada-maret-2023>
- Aprilia, R. D. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan (Studi kasus kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008–2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Asbiantari, D. R., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2016). Pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 10–31.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023, July 12). Statistik pengeluaran untuk konsumsi penduduk Provinsi Sumatera Utara 2022. <https://sumut.bps.go.id/id/publication/2023/07/12/fc5a9f6f5005a733734bb4cd/statistik-pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-provinsi-sumatera-utara-2022-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020, November 5). Tingkat pengangguran terbuka. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

- Bahriyah, M., & Primandhana, W. P. (2022). Pengaruh tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Kabupaten Gresik. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(1), 32–39.
- Dewi, K. S., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Idea*, 3(4), 834–847.
- Fahjarini, E. D. N., & Fahraty, E. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap kemiskinan di Kota Banjarmasin tahun 2007–2018. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(2), 327–341.
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis permasalahan pengangguran di Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1), 366–375.
- Gulo, Y. O. (2020). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000–2018 [Skripsi, Universitas Negeri Medan].
- Hadi, S., Taufiki, A., Ahmad, M. Z., & Siswanto, A. (2024). Analisis tingkat kemiskinan tahun 2023 di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. *Journal of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(1), 32–39.
- Kunenengan, R. M. A., Engka, D. S., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan lima kabupaten/kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 133–144.
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2017–2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(1), 82–95.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014–2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212–222.

Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1049–1062.

Sunusi, D. (2014). Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001–2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).

Syahputri, R. K. R., & Fisabilillah, L. W. P. (2022). Pengaruh pengangguran, upah minimum, dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 169–184.

Syofya, H. (2018). Pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 177–185.

Ujung, M. S. B. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2000–2020. *Journal of Economic and Business*, 3(1), 23–40.

Wijaksana, A. C. (2022). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten periode tahun 2016–2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 99–113.